

SKRIPSI

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

(Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram



OLEH:

SURYA MARIANA
NIM : 216130110

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

(Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019)



Disusun dan diajukan Oleh :

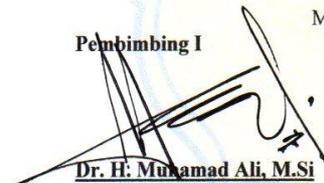
SURYA MARIANA
NIM : 216130110

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi

Mataram, 27 januari 2021

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II


Hidayatullah S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

(Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019)



Disusun dan diajukan Oleh :

SURYA MARIANA
NIM : 216130110

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN. 0806066801

(PU) 

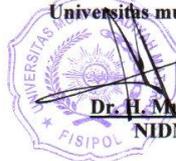
2. **Hidayatullah S.IP., M.IP**
NIDN. 0809038902

(PP) 

3. **Drs. Amil, MM**
NIDN. 0831126204

(PN) 

Mengesahkan,
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas muhammadiyah mataram
Dekan



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SURYA MARIANA

Nim : 216130110

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintah

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi Ntb Tahun 2019)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis di publikasi orang lain, kecuali secara tertulis tercantum dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 05 Januari 2021

Penulis



Surya Mariana
216130110



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Mariana
NIM : 216130110
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang - 23 - October - 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOK
No. Hp/Email : 085238 412292 / surya.mariana23@gmail.com

Judul Penelitian :-

Peran dinas sosial dalam pemberdayaan Perempuan
melalui Program keluarga harapan (PKH)
(Studi kasus dinas sosial Provinsi NTB tahun 2019)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 65% 64% 54% 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 8 / 02 / 2021

Penulis



Surya Mariana
NIM. 216130110

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Mariana
NIM : 216130110
Tempat/Tgl Lahir : Taliwang - 23 - Oktober - 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOC
No. Hp/Email : 085238412292 / suryamariana23@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan
Melalui program keluarga harapan (PKH)
(Studi kasus : Dinas sosial provinsi NTB tahun 2019)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24 / 02 / 2021

Penulis



Surya Mariana
NIM. 216130110

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan mereka sendiri

(QS. Ar Ra'd : 11)

Dan bahwasahnya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah di usahakannya.

(An najam : 39)

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karna kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari allah.

(Imam Bin Al Qayim)

Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa berhenti.

(Emba Ainun Nadjib)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempuena, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai dan Sekripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi :

Kepada bapak dan mamak tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan ku sampai kini.

Saudara-saudaraku yang sudah memberikan dukungan dan doa yang luar biasa.

Keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabat seperjuangan di universitas muhammadiyah mataram dan semua teman-teman terspecialku, *for u all miss u forever.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019)

Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen pembimbing pertama, terimakasih atas bimbingannya yang penuh sabar dan teliti.
3. Bapak Hidayatullah, S.Ip.,M.Ip selaku dosen pembimbing kedua, terimakasih atas bimbingannya yang penuh sabar dan teliti.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku kaprodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Teruntuk ibuku tercinta Mardiah dan bapakku Saparuddin terimakasih atas do'a dukungan semangat selama ini dan lebih khususnya ketika penulis menyusun proposal penelitian skripsi ini.
7. Untuk kakakku Eka Apriliyanti terimakasih atas do'a dorongan dan semangat selama ini.

8. Untuk teman-temanku tercinta, rahmawati, meiztizalia triastiti aulia, linda sari, dini mirya mugitri, lili suryani, meliyanti, yang telah sama-sama berjuang dalam suka dan duka, letihnya selama perkuliyahan dan dalam menyelesaikan proposal penelitian selama ini.
9. Untuk teman-temanku yang terspesial, ria anggraini, fitri kurnia zenrayanti, faridil akbar, putrid dwi setiana muliyadi terimakasih atas do'a dan dukungannya slama ini.
10. Untuk aswat syadila pratama terimakasih atas do'a dan dukunganya selama penyusunan skripsi ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 26 Januari 2021

Surya Mariana
216130110

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

(Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019)

Oleh

SURYA MARIANA

Penelitian ini mengkaji tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan masyarakat dengan adanya Program Keluarga Harapan terhadap pemberdayaan perempuan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas Sosial dalam pemberdayaan Perempuan melalui program PKH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan di Wilayah kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal penyediaan akses informasi dan partisipasi pemberdayaan baik secara individu maupun kelompok. Kepada para perempuan Penerima Manfaat PKH diberikan program pendampingan dan pelatihan usaha mandiri secara individu dan kelompok usaha bersama. Dinas Sosial juga memberikan pendampingan melalaui koordinator wilayah dalam bidang kesehatan keluarga, pendidikan anak dan lansia.

Kata Kunci: Program PKH, Pemberdayaan Perempuan

ABSTRACT

**THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN EMPOWERING WOMEN
THROUGH THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH)**

(Case Study on the Social Service of NTB Province in 2019)

By.
SURYA MARYANA

This research studied the social services office's role in empowering women through the Family Hope Program (PKH) at the Social Service Office of Nusa Tenggara Province. This study aims to determine society's development towards women's empowerment through the family hope program and determine the factors that influence the Social Service's role in empowering women through the PKH program. This research used descriptive qualitative. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The results showed that the Social Service has an important role in empowering women in West Nusa Tenggara Province in providing information access and empowerment participation either individually or in groups. PKH beneficiary women were provided with mentoring and training programs for independent businesses individually and in groups. The Office of Social Services also provided assistance through regional coordinators on family health, education for children and the elderly.

Keywords: PKH Program, Women Empowerment



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Teori	17
2.2.1 Pengertian Peran	17
2.2.2 Peran pemerintahan	20
2.3 Pengertian Pemberdayaan	23
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan.....	25
2.3.3 Tahap – Tahap Pemberdayaan	26
2.4 Pemberdayaan masyarakat	26
2.5 Aspek –aspek pemberdayaan masyarakat	29

2.6	Pemberdayaan perempuan	30
2.7	Pengertian Program	35
2.8	Program Keluarga Harapan (PKH)	36
2.8.1	Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	36
2.8.2	Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	38
2.8.3	Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)	39
2.8.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pelaksanaan PKH	39
2.9	Kerangka berfikir	40
2.10	Definisi konseptual	41
2.11	Definisi oprasioanl	42
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Metodeologi Penelitian	44
3.2	Lokasi Penelitian	45
3.3	Waktu Penelitian	45
3.4	Jenis dan Sumber Data	45
3.4.1	Sumber Data	45
3.4.2	Jenis data	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1	Obsevasi	46
3.5.2	Wawancara	47
3.6	Teknik Pengumpulan Sampel / Narasumber	48
3.7	Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	52
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi NTB	52
4.1.2	Visi Dan Misi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat	54
4.1.3	Gambaran Umum Pelayanan Di Dinas Dosisl Provinsi NTB	56
4.1.4	Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi NTB	56
4.1.5	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi NTB	58
4.2	Hasil Dan Pembahasan	59
4.2.1	Aspek-Aspek Pemberdayaan	59
4.2.1.1	Akses Terhadap Informasi	59
4.2.1.2	Partisipasi Pemberdayaan	61

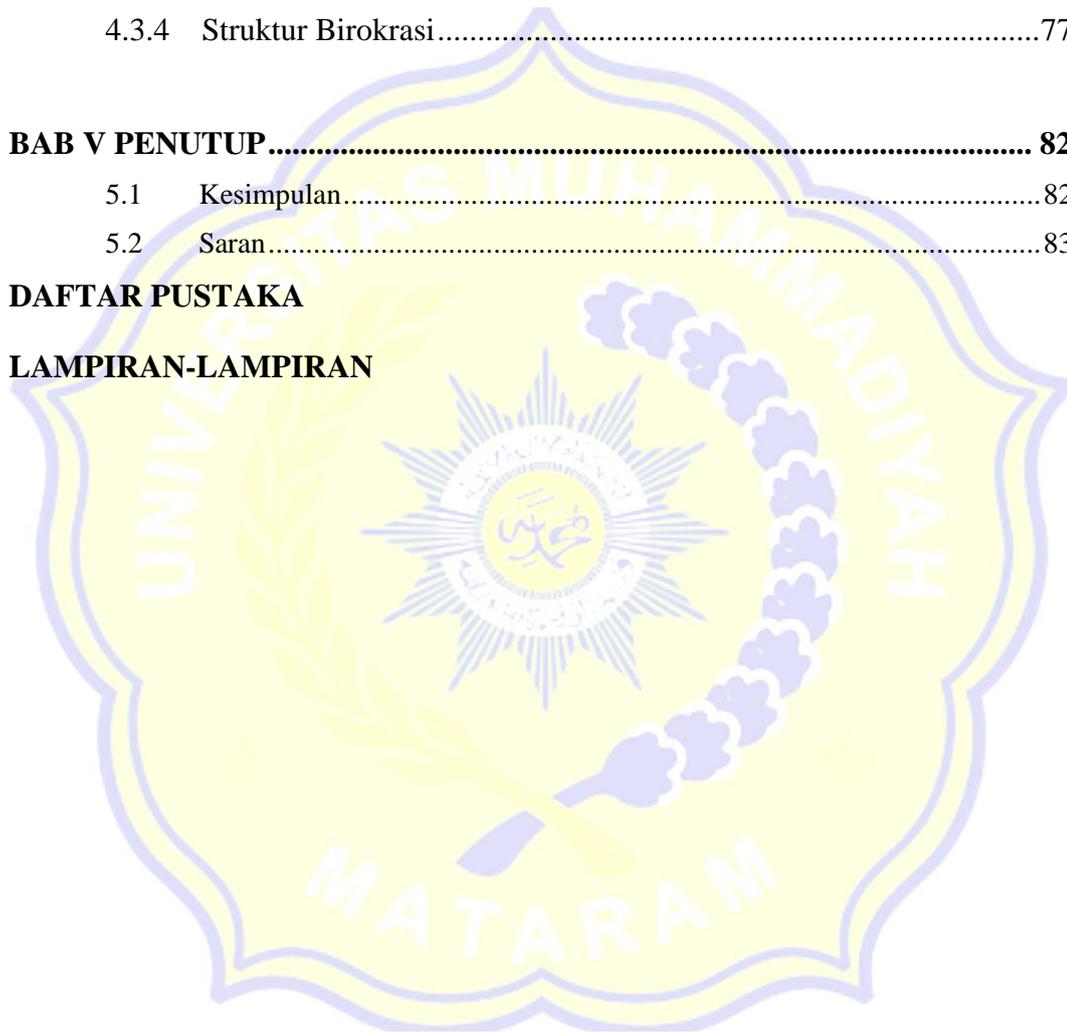
4.2.1.3. Akuntabilitas.....	63
4.2.1.4 Kapasitas Organisasi.....	66
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan PKH.....	67
4.3.1 Komunikasi.....	67
4.3.2 Sumber daya	72
4.3.3 Disposisi	77
4.3.4 Struktur Birokrasi.....	77

BAB V PENUTUP 82

5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83

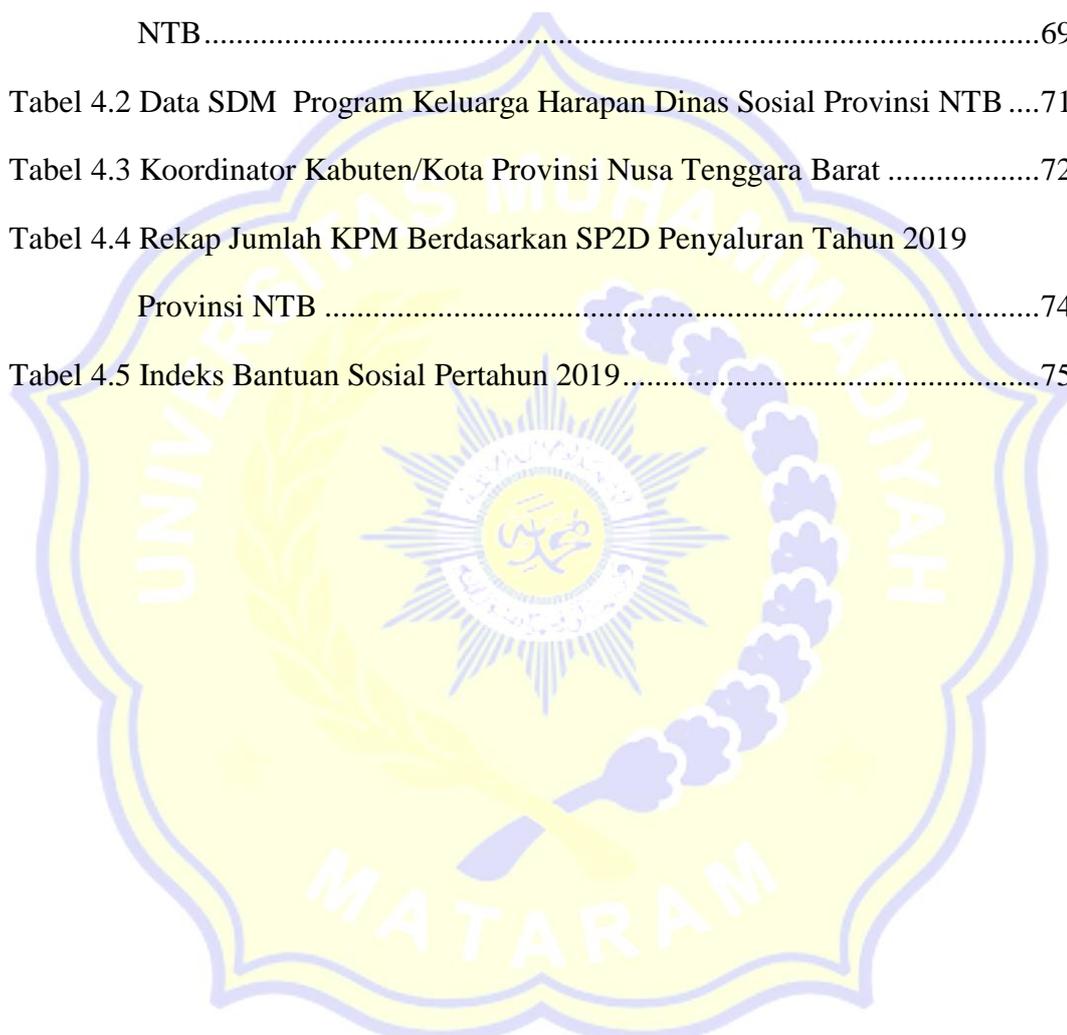
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Nara Sumber	48
Tabel 4.1 Jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri Peserta PKH Provinsi NTB.....	69
Tabel 4.2 Data SDM Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Provinsi NTB	71
Tabel 4.3 Koordinator Kabuten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	72
Tabel 4.4 Rekap Jumlah KPM Berdasarkan SP2D Penyaluran Tahun 2019 Provinsi NTB	74
Tabel 4.5 Indeks Bantuan Sosial Pertahun 2019.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 4.1 Tampilan Kartu PKH	68





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara sedang berkembang yang masih diliputi dengan permasalahan kemiskinan. Kemiskinan yang multidimensi dan merupakan masalah yang telah ada sejak lama dan tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius karna saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih belum bisa teratasi dan selalu menimbulkan efek domino terhadap seseorang. Pada umumnya masyarakat yang masih terbelakang, berpenghasilan rendah, dan jika diukur dengan kebutuhan hidup minimum masih dibawah stardar itulah yang kebanyakan orang mendefinisikannya sebagai masyarakat miskin.

Kemiskinan Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus, karna masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karna kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis ekonomi yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarnakan Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang

terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan Negara-negara maju, maka dari itu Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana yang sudah tercantum dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan sosial menyebutkan:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk program keluarga harapan. Untuk selanjutnya Program Keluarga Harapan merupakan Program Nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 oleh kementerian sosial RI. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan secara teknik dijalankan berdasarkan keputusan menteri sosial republik Indonesia nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang program keluarga harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. Bentuk program ini adalah pemberian bantuan nontunai kepada keluarga penerima manfaat. Dengan banyaknya kebijakan pemerintah

yang tertuang dalam program-program bantuan sosial yang ada. Program ini dikeluarkan melalui kementerian sosial dan dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial.

Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Setelah diatas diuraikan secara singkat tentang PKH tersebut sangatlah ideal menjadi salah satu jalan solusi mengatasi rantai kemiskinan yang sudah akut pada bangsa Indonesia, seperti telah dipaparkan beberapa paket kebijakan yang dibuat dalam undang-undang dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari kenyataan relasi gender yang melemahkan posisi perempuan, diperlukan kebijakan, strategi, dan program yang bersifat afirmatif yang bertujuan memberdayakan perempuan dalam aspek apapun yang akan memberikan kontribusi penting untuk kesetaraan gender(Mawardi,2013:9).

karna itu upaya penanggulangan masalah kemiskinan tidak dapat dilepas dari perhatian terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan harus menjadi proritas program. Salah satu jenis program penanggulangan kemiskinan yang telah diperaktekan diberbagai Negara dikenal dengan *conditional cash transfer (CCT)*. CCT adalah jenis program yang

memberikan bantuan tunai kepada kelompok miskin dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi (Doetichem, 2008).

Program keluarga harapan merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meningkatkan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. PKH juga bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Peraturan menteri sosial tentang program keluarga harapan nomor 1 tahun 2018, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program keluarga harapan ini beradab dibawah kendali direktorat jendral bantuan dan jaminan sosial, kementerian sosial. Selanjutnya untuk disetiap provinsi terdapat tim koordinasi PKH provinsi yang melakukan koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH, serta melaksanakan koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan PKH. Untuk memudahkan

pelaksanaan program keluarga harapan ditingkat kecamatan, maka dibentuklah unit pelaksana PKH (UPPKH) kecamatan yang terdapat peserta PKH. UPPKH kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personel UPPKH kecamatan terdiri dari pendamping PKH. Secara kelembagaan, pendamping harus melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke sekretariat UPPKH kabupaten/kota Dinas sosial dan koordinator wilayah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, UPPKH kecamatan bertanggung jawab kepada UPPKH kota dan berkoordinasi dengan camat. Namun dalam pelaksanaan program keluarga harapan masih terdapat hambatan, diantaranya masih adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan, sehingga secara tidak langsung dapat berpotensi timbulnya konflik secara vertikal dan horizontal.

Penyelenggaraan program keluarga harapan bersifat multisektor baik di pusat maupun di daerah melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa, serta masyarakat. Bantuan yang disalurkan bersumber dari APBD, untuk kelancaran pelaksanaan di kabupaten/kota terdapat keterlibatan APBD untuk kegiatan pendukung program keluarga harapan ditingkat kabupaten/kota.

Dari sisi kebijakan sosial, program keluarga harapan merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat,

kuhususnya bagi rumah tangga sangat miskin. Program keluarga harapan yang mewajibkan rumah tangga sangat miskin memeriksa kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku bagi rumah tangga sangat miskin terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah rumah tangga sangat miskin yang bekerja ataupun tidak melanjutkan pendidikan. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada.

Dinas sosial yaitu suatu unit pemerintahan dibidang sosial yang mengurus suatu kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dinas teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan oprasional di bidang kesejahtraan sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur serta tugas pembantuan.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, dinas sosial sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dinas sosial sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

“menurut UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, dan perlindungan sosial.”

PKH NTB merupakan program yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat NTB melalui bantuan tunai dan memberikan pelayanan kesehatan sejak masih dalam kandungan seperti yang telah dipaparkan oleh sekretaris Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rapat koordinasi program keluarga harapan tingkat provinsi dalam rapat tersebut sekretaris Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan rapat koordinasi ini di anggap sangat penting dalam mengawali dan membangun sinergitas organisasi prangkat daerah (OPD) terkait dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten Kota. Dimana pelaksanaan yang didukung oleh SDM PKH dalam implementasi teknis mencapai harapan yang diinginkan. Disamping tentang implementasi

teknis. Program dan kebijakan masing-masing OPD/instansi terkait menentukan persepsi saling mendukung dalam ikatan sinergitas tentang pelayanan bantuan sosial untuk warga masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan demikian, peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH adalah untuk mengupayakan agar masyarakat mempunyai keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Oleh karena itu pendampingan sangat penting bagi penerima PKH, pengentasan kemiskinan melalui PKH akan bertanggung pada peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mendefinisi standar kehidupan yang layak bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut kemudian penulis tertarik mengambil judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB) Mataram Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi NTB dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH ?
2. Factor-faktor yang mempengaruhi peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui perkembangan masyarakat dengan adanya PKH terhadap pemberdayaan perempuan yang ada di Dinas Sosial Provinsi NTB.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui PKH.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Penelitian ini sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan program keluarga harapan dalam mensejahterakan dan memberdayakan perempuan.
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pihak yang membutuhkannya.
2. Sebagai salah satu pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada dimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya program keluarga harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

3. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan atau wawasan dan informasi dalam bidang pengembangan dan dapat menjadi tambahan literature ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan refrensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, focus penelitian terdahulu yang di jadikan acuan adalah terkait dengan masalah Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggi Anggraini dengan judul implementasi program keluarga harapan di kota Bandar Lampung pada tahun 2014, secara umum implementasinya dinilai efektif dan telah berjalan sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses implementasinya yang berjalan sesuai dengan perencanaan, terkoordinasi, terintegrasi dan sistematis, dengan sedikit hambatan dalam kegiatan sosialisasi, pengorganisasian tahap pembayaran dan pelaksanaan verifikasi

komitmen, namun tujuan serta sasaran PKH inipun sudah mulai tercapai dengan baik. Dampak yang dirasakan peserta program adalah semakin meningkatnya penggunaan fasilitas kesehatan oleh ibu hamil, ibu nifas, bayi serta anak balita. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya upaya mempercepat tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan, monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan aspirasi peserta terhadap program tersebut menjadi lebih baik lagi.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Iqbal dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2008. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Hasil analisis menunjukkan bahwa program keluarga harapan telah berjalan sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaannya. Dampak yang dirasakan peserta program adalah semakin meningkatnya penggunaan fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh anak usia sekolah, ibu hamil serta anak balita. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksanaan program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hamper sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksanaan program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Hajar Hari Antoro dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Di Bidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa sungai kakap kabupaten kubu raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa sungai kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa sungai kakap tidak berprestasi, karna masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mencapai tujuan PKH bidang pendidikan.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Masita Luluhang dengan judul implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di desa kandahe II kecamatan kandahe kabupaten sangihe pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit program keluarga harapan kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan program keluarga harapan yaitu : pendataan calon peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, dan pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur rizkha.s.dengan judul kenerja pusat pelayanan terpadu dalam pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) studi kasus kekerasan seksual di kabupaten sinjai pada tahun 2015. Hasil penelitian adalah kenerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dilihat dari segi efesiensi bahwa pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karna seluruh kasusu kekerasan seksual sudah diselsaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, kesehatan dan bantuan hukum.

Table 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Anggi Anggraini 2014	Implementasi program keluarga harapan di kota Bandar lampung	Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya upaya mempercepat tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan , monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan apresiasi peserta terhadap program tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Kerna mekanisme program keluarga harapan anataralain pertemuan awal, sosialisasi, pembayaran pemberian pelayanan kesehatan dan verivikasi komitmen. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat hambatan seperti masih banyak peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen karna kurangnya sosialisasi kepada

			<p>masyarakat sehingga banyak warga miskin yang tidak memahami tentang pentingnya kesehatan ibu hamil, bayi dan balita. bagi RTSM yang tidak mematuhi komitmen akan dikenakan sanksi berupa potongan dana bantuan dan pada tahap pembayaran kurang tertib, dikarenakan padatnya antrian sementara loket khusus pembayaran dana PKH hanya dua loket. Kurangnya koordinasi dengan PT. pos dalam penyediaan sarana pembayaran dana PKH menjadi salah satu factor penghambat PKH.</p>
2	Hasbi iqbal 2008	Implementasi kebijakan program keluarga harapan dikecamatan kudos	<p>Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya upaya mempercepat tindak lanjut pengaduan yang telah di sampaikan, sehingga diharapkan apresiasi peserta terhadap program tersebut menjadi lebih baik lagi.</p>
3	Hajar Hari Antoro 2015	Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan bidang pendidikan di desa sungai kakap kabupaten kubu raya	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa sungai kakap kabupaten kubu raya masih kurang efektif dan tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa sungai kakap tidak berprestasi, karna masih belum sepenuhnya</p>

			tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mencapai tujuan PKH di bidang pendidikan.
4	Iqbal nugraha 2018	Implementasi program keluarga harapan oleh unit pelaksana PKH (UPKH) dinas sosial kabupaten lampung timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit program keluarga harapan kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan program keluarga harapan yaitu : pendataan calon peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan.
5	Nur rizkha.s.2015	Kinerja pusat pelayanan terpadu dalam pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) studi kasus kekerasan seksual dikabupaten sinjai	Hasil penelitiannya adalah kinerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dilihat dari segi efesiensi bahwa pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karna seluruh kasus kekerasan seksual sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, dimana dari semua penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan disetiap wilayah sehingga dapat diketahui perbedaan

apa saja yang muncul di setiap wilayah. perbedaanya juga dilihat dari segi pelayanan, masih kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan, masih kurang efektif dan tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH, masih terdapat hambatan seperti masih banyak peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak warga miskin yang tidak memahami tentang pentingnya kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, dan ada juga beberapa wilayah yang merasakan dampak positifnya yaitu dampak yang dirasakan peserta program adalah semakin meningkatnya penggunaan fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh anak usia sekolah, ibu hamil serta anak balita.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Peran

Peran adalah suatu system kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan yaitu: pendataan calon peserta, sosialisasi, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, pengawasan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan. Kelompok-kelompok peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah

berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum (soekanto,2006:60).

Suatu peranan dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

a) Peran yang ideal (*ideal role*)

Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas sosial sebagai salah suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat,artinya peranan yang nyata.

b) Peran yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

c) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata (soekanto, 2010:5)

Peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi,berarti

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat (Taneko,1986:23).

Peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status),apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya,maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normative. Sebagai peranan normative dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dinas Sosial dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement,yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto,2002:243).Batasan bahwa peran adalah orang yang memegang pimpinan utama apabila akan terjadi sesuatu atau peristiwa (Poerwadarminta,2003:735).

Lima aspek penting dari peran,yaitu :

- a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individualnya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*taks behavior*):yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama: seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bias saja memainkan beberapa peran (Scott et al.1981 dalam kanfer,1987:197).



Berdasarkan beberapa aspek diatas,maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis (tindakan atau perilaku)yang diharapkan seseorang menduduki posisi tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system sosial.

2.2.2 Peran pemerintahan

Menurut Tjokromidjojo (1995,18) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

- a. Pertama peranan pemerintahan adalah sebagai penjaga keamanan dan keterlibatan dalam pembangunan
- b. Kedua timbul pengertian tentang *service state*, dimanaperan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
- c. Ketiga, peranan pemerintah sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat.

2.2.2.1 Peran pemerintah daerah

Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Menimbang :a. bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wakil kota;

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;

Mengingat : 1. Pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22D undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945;

2. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi undang (lembar Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 24, tambahan lembar Negara republik Indonesia nomor 5657);

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 undang-undang dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno menjelaskan undang-undang tersebut antara lain: undang-undang nomor 1 tahun 1945, undang-undang nomor 22 tahun 1948, undang-undang nomor 1 tahun 1957, undang-undang nomor 18 tahun 1965, undang-undang nomor 5 tahun 1974, undang-undang nomor 22 tahun 1999, undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan terakhir undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Pemerintah daerah menurut W. Riawan Tjandra adalah:

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, ect* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasan di undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan system pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan *OxfordEnglish Dictionary* kata empower mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give*

ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai member kekuasaan.mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua ,diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Menurut SumodiningratGunawan,2000 :bahwa pada proses pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa pendekatan yaitu : Pertama, upaya itu harus terarah.Upaya ini ditunjukkan langsung kepada yang memerlukan,dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.Kedua program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.Ketiga menggunakan pendekatan kelompok.

2.3.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan wujud nyata bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat yang pada hakekatnya desa merupakan badan terendah pemerintahan serta memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang seperti dalam undang-undang desa no.6 tahun tentang desa. Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggris “*empowerment*” yaitu pelimpahan kekuasaan atau wewenang yang konteksnya yaitu proses pemberdayaan masyarakat. (Ambar Teguh S,2004:80-81) pemberdayaan sebagai sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan objek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan dan Hemprin, 2003 : 44).

Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat desa.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Tiga aspek tersebut (kognitif, psikomotorik, dan afektif) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi

kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan, keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S,2004:80-81).

2.3.3 Tahap – Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.

Tahap – tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

1. Tahap penyadaran dalam pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. (Ambar Teguh S,2004:82-83).

2.4 Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Onny. S. Prijono (1996: 97) adalah pembangunan manusia seutuhnya atau masyarakat seutuhnya, dengan kata lain

memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Menurut Sudjana (2001:256) pentingnya pembangunan masyarakat yang menitik beratkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peran sektor-sektor lainnya, sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya susatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat kearah yang lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

menurut Sunyoto Usman (2010:31). Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa

untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Dalam pemberdayaan perlu diperkirakan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan diberdayakan, menurut Schumacer dalam Ambar Teguh S, (2004 :90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya memiliki daya untuk membangun.

Disamping itu, NGO (*Non-Geovernmental Organization*) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karna dipandang lebih bersifat wiraswasra, berpengalaman dan lenih inovatif dibandingkan dengan pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good govermence*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku atau potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi.

Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhan dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

2.5 Aspek –aspek pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaannya, Narayan (2002) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut :

1. Akses terhadap informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuatan dan kesempatan. Kekuasaan disini tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Informasi member khasana dan wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Partisipasi pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi

sosial membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai “dari atas”. Sementara partisipasi secara sederhana diartikan bagaimana komunitas miskin terlibat dan peran apa yang dimainkan.

3. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut. Terdapat mekanisme akuntabilitas yaitu mekanisme politik, administrative, dan publik.
4. Kapasitas organisasi local merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, diluar jangkauan sistem formal, perempuan miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kapasitas organisasi local merupakan kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan.

2.6 Pemberdayaan perempuan

2.6.1 Pengertian pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment* merupakan konsep yang lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, terutama erofa (prijono dan pranaka, 1996:3)

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/

kemampuan, atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:77).

Pemberdayaan berarti pemberian kemampuan dari suatu individu atau kelompok yang sudah berdaya kepada individu atau masyarakat agar menjadi berdaya.

Menurut Karl M (dalam priyono dan pranaka, 1996:63) pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran atau pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.

2.6.2 Tujuan pemberdayaan perempuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulistiyani (2004:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan

masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kemandirian masyarakat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan diatas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat (2002 :41) yaitu sebagai berikut.

1. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.
2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik disektor publik maupun domestik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan

potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversif proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhan sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan. Proses ini pernah dilakukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah PPM IbM tahun 2009, di parangtritis bantul, yang hasilnya bahwa dengan metode partisipasi aktif, perempuan kelompok perempuan pesisir setelah mendapatkan tambahan pelatihan, dan pendampingan pelaksanaan hibah PPM 2009 ini adalah perempuan pesisir menjadi mandiri dalam hal ekonomi dan sosial, dan dapat ikut mengembangkan lingkungan sosialnya. Dengan meningkatkan kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya, yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga

akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan (Indriyati,dkk,2009).

Hasil penelitian PSW UGM tahun 2006, merumuskan bahwa pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan diberbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Selanjutnya dalam salah satu rekomendasi penelitiannya menyebutkan bahwa perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai implementasi inpers no.9 tahun 2000 (Tim PSW UGM,2006 : 70).

Dengan menerapkan model pendekatan pemberdayaan perempuan desa melalui pendekatan sosiokultural, ekonomi dan lingkungan hidup dapat diharapkan perempuan miskin mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan pendekatan kultural dapat diketahui faktor-faktor budaya yang mendukung perubahan. Pendekatan ekonomi ini diharapkan perempuan dapat meningkatkan penghasilan melalui usaha ekonomi produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan pendekatan lingkungan perempuan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungannya melalui kesadaran untuk masa depan generasi penerusnya.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui program-program pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya pengentasan kemiskinan juga harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan tersebut.

2.7 Pengertian Program

Menurut Jogiyanto (2002:12), yang dimaksud dengan program adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Karakteristik program dalam buku Jogiyanto H.M (1985:3), beberapa karakteristik suatu program adalah sebagai berikut :

- a. Komponen program
- b. Batas program
- c. Lingkungan luar program
- d. Penghubung program
- e. Masukan program

Pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai suatu program atau tidak, yaitu :

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan program atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif maka akan diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni : sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan melakukan intervensi maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang akan menjadi solusi terbaik (Charles O Jones, 1996:295).

Dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan suatu kegiatan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

2.8 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.8.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan). Yang dimana Program keluarga harapan adalah program

perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dan diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi agar dapat keluar dari kemiskinan. Program Keluarga Harapan bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kelaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium. Lima komponen tujuan *Millennium Development Goals* yang akan terbantu oleh Program Keluarga Harapan yaitu : pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi

dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan. (Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan).

2.8.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan program keluarga harapan mengacu pada peraturan menteri sosial (pemensos) nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 2 yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Meningkatkan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, untuk membantu meningkatkan beban pengeluaran keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan maupun memperkenalkan manfaat dan jasa keuangan formal pada masyarakat miskin.

2.8.3 Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Ditegaskan dalam permensos 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan menurut pasal 3. Bahwa sasaran Program Keluarga Harapan yaitu keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran dari program keluarga harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdapat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun, komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI, atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

2.8.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pelaksanaan PKH

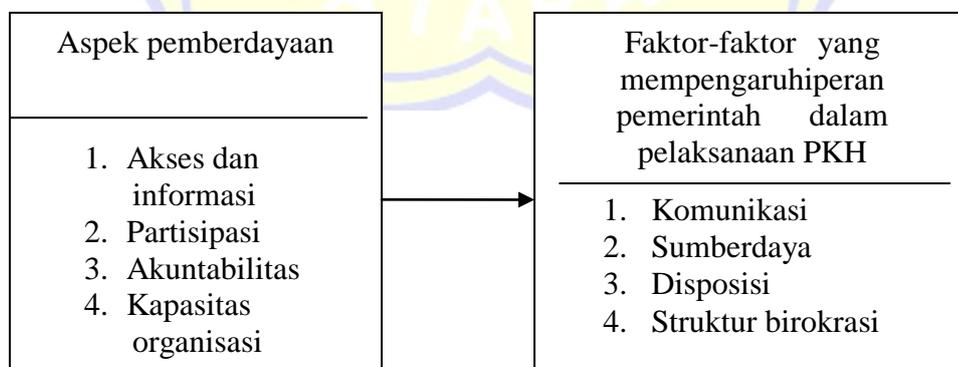
Menurut George Edward (dalam Winarno, 2016) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, dimana terlihat bahwa komunikasi dari pendamping ke keluarga penerima manfaat sudah berjalan sangat baik. Hal

tersebut dilaksanakan melalui adanya pertemuan kelompok yang dilakukan tiap bulan untuk melakukan sharing bersama-sama.

2. Sumber daya, dimana sudah mulai bisa dicapai walau dengan skala kecil. Karena para peserta program merupakan keluarga yang memiliki pendidikan rendah sehingga perlu perhatian yang ekstra dalam penyampaian segala informasi.
3. Kecendrungan-kecendrungan yang mana pemerintah daerah dan *stakeholder* telah berpartisipasi dalam implementasi program ini. Dengan mendukung dan menyelenggarakan segala kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para keluarga penerima manfaat.
4. Struktur birokrasi, adalah pelaksana yang professional dan handal yang mana didalamnya ada koordinator wilayah, oprator dan pendamping PKH yang dengan tupoksinya selalu mendukung jalannya implementasi pemberdayaan dalam program keluarga harapan.

2.9 Kerangka berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

2.10 Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah unsure penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variable, sebagai berikut :

1. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, sehingga tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat muncullah apa yang dinamakan peran (role).
2. Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan yang dilakukan seperti keterampilan, pengembangan pengetahuan dan potensi yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok baik itu dari segi sosial, budaya maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.
3. Pemberdayaan perempuan adalah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan adalah sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam pengambilan keputusan dalam tindakan transformasi agar

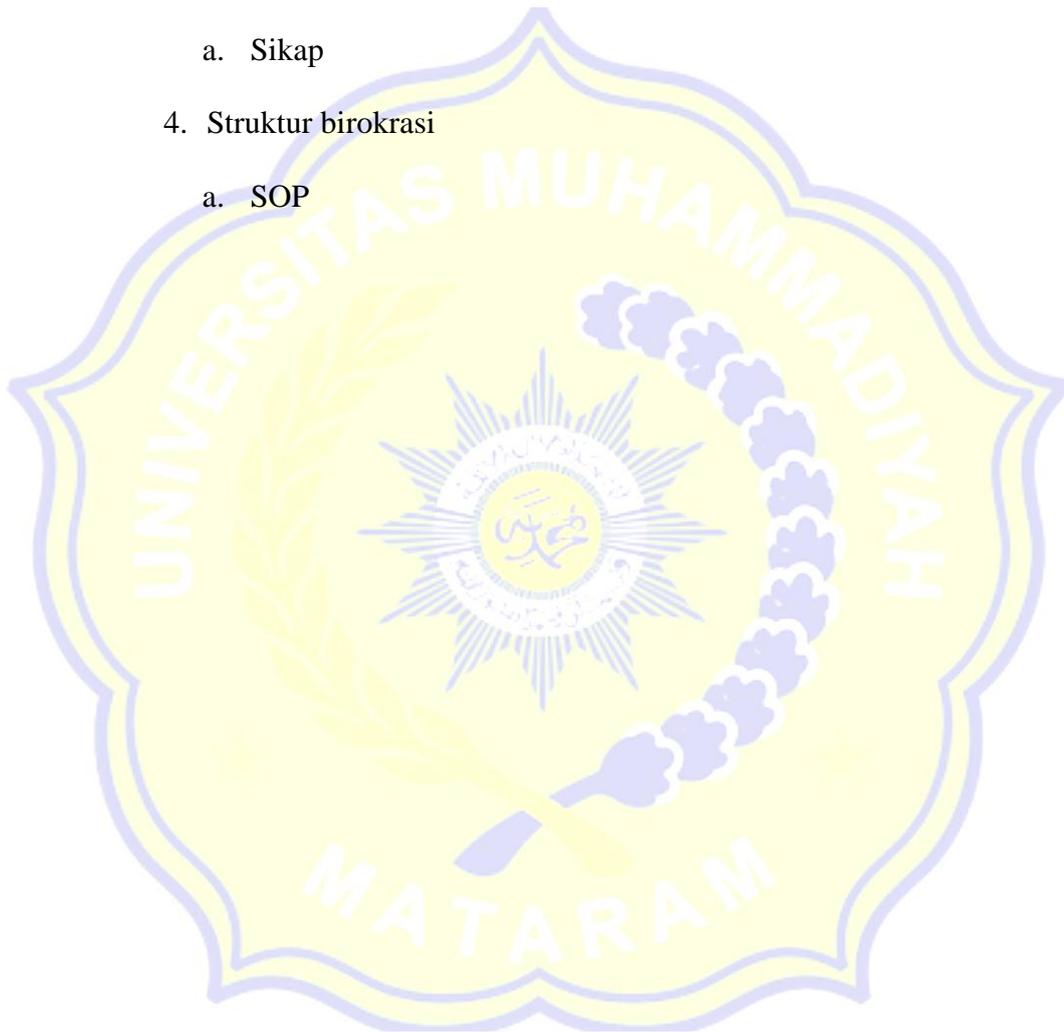
menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

4. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, melalui PKH keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

2.11 Definisi oprasioanl

1. Aspek-aspek pemberdayaan
 1. Akses terhadap informasi
 2. Partisipasi pemberdayaan
 - a. Individu
 - b. Kelompok
 3. Akuntabilitas
 - a. Administrariv
 4. Kapasitas organisasi
2. Faktor–faktor yang mepengaruhi peren pemerintah dalam pelaksanaan PKH
 1. Komunikasi
 - a. Dimensi transmisi
 - b. Dimensi kejelasan

- c. Dimensi konsistensi
- 2. Sumber daya
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sumber daya anggaran
- 3. Disposisi
 - a. Sikap
- 4. Struktur birokrasi
 - a. SOP



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodeologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awal metodenya ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), anaalisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Pengumpulan data dengan observasi wawancara yang menghasilkan data berbeda maka data tersebut belum pasti. Bila data yang diperoleh masih diragukan, dan belum memperoleh kepastian,

maka penelitian masih harus dilanjutkan. Jadi pengumpulan data dengan teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga dapat diperoleh data yang pasti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Sosisl Provinsi Nusa Tenggara Barat. karena ingin mengetahui peran dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui program keluarga harapan.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 Bulan dimulai pada bulan agustus sampai September 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Melong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

3.4.2 Jenis data

1. Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil

pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari reponden penelitian, peneliti yang baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

3.5

Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Obsevasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.

Pengertian observasi menurut nasution dalam sugiyono (2014:226), yaitu :

“Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.”

3.5.2 Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut.
“a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut sugiyono (2015 : 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.6 Teknik Pengumpulan Sampel / Narasumbe

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, teknik sampling yang digunakan yaitu Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang / kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Jadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu:

Table 3.1 Narasumber

Nama	Jabatan
1. H. Ahsanul Khalik	1. Kepala dinas sosial provinsi NTB
2. Sulaiman Jamsuri	2. Kepala bidang linjamsos
3. Mukhlis	3. Koordinator regional
4. Nurhasim	4. Koordinator wilayah
5. Mardiah Jawariah	5. Keluarga penerima manfaat

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut, “*looking at display help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*” Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. Conclusion Drawing/ verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

